

PENGARUH PENDAPATAN DAN PEMBELIAN ASSET TERHADAP PELAPORAN PAJAK ORANG PRIBADI BERBASIS SISTEM KOMPARASI PADA MITRA KERJA PT ABC

Yuni Astuti¹, Agus Munandar²
Universitas Esa Unggul, Indonesia
agus.munandar@esaunggul.ac.id

Submitted: 08th July 2024/ **Edited:** 22nd Sept 2024/ **Issued:** 01st Oct 2024
Cited on: Astuti, Y., & Munandar, A. (2024). PENGARUH PENDAPATAN DAN
PEMBELIAN ASSET TERHADAP PELAPORAN PAJAK ORANG PRIBADI
BERBASIS SISTEM KOMPARASI PADA MITRA KERJA PT ABC. *SCIENTIFIC
JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(4),
1144-1155.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the influence of income and asset purchases on individual tax reporting using a comparative system carried out on the scope of PT ABC's partners. This study uses quantitative descriptive methods in the form of observations, interviews and case studies on tax reporting documentation. Based on the results of observations and interviews, many respondents do not know the influence of income and asset purchases on personal tax reporting, so many of the respondents are unable to explain questions from the tax office regarding income that is not propotional to asset purchases. The results of the study show that the comparative system implemented by PT ABC in handling personal tax reporting is very effective and able to minimize these problems.

Keywords: Income, Asset Purchases, Individual Tax Reporting, Comparison System

PENDAHULUAN

Pendapatan memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi, karena dengan memiliki pendapatan seseorang dapat membeli sesuatu yang diinginkan seperti kendaraan, property, investasi saham dan lain-lainnya. Pendapatan dapat diperoleh dari berbagai aktivitas usaha. Menurut (Sjahputra & Hunein, 2024), "Pendapatan muncul dari aktivitas normal Perusahaan yang memberikan manfaat ekonomi dari satu periode dan mengakibatkan ekuitas, yang tidak berkontribusi kepenanaman modal". Aktivitas usaha dapat berupa penjualan atas barang ataupun pemberian jasa dengan aktivitas ini seseorang akan menghasilkan pendapatan. Manfaat dari pendapatan itu sendiri ada yang difungsikan hanya sebagai alat untuk mencukupi kebutuhan hidup atau dapat juga difungsikan sebagai kesempatan untuk memperbanyak asset dan investasi. Menurut (Siahaan, et al.,

2022), “Pendapatan adalah inflow of assets kedalam Perusahaan akibat penjualan barang atau jasa”.

Tanpa disadari terkadang seseorang memanfaatkan pendapatan yang diperoleh untuk transaksi pembelian asset, namun tidak semua orang dapat membedakan komponen yang dikategorikan sebagai asset atau biaya hidup. Pembelian yang bersifat habis terpakai tentu saja masuk dalam kategori biaya sementara pembelian yang memiliki manfaat dimasa yang akan datang termasuk dalam kategori asset, menurut Sumahardanti & Fatimah (2023), “Aset adalah barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu”. Asset memiliki berbagai macam fungsi dan bentuk, asset dapat berwujud benda-benda yang dapat terlihat secara nyata seperti mobil, rumah, tabungan dan lain nya, namun terkadang asset juga dapat berwujud abstrak dan tidak terlihat tapi memiliki nilai yang sangat luar biasa misalnya saja merk dagang, hak cipta dan lain-lainnya (Irfani, 2020).

Komponen pendapatan dan aset merupakan hal yang sangat berkaitan erat dengan pelaporan pajak orang pribadi, pelaporan tersebut termasuk sistem pajak self assessment ciri dari sistem pajak ini wajib pajak orang pribadi memiliki keharusan untuk menyampaikan pelaporan pajak nya secara mandiri (Sutedi, 2022). Dampak positif dari sistem self assessment mampu mendorong seseorang untuk lebih peduli terhadap mekanisme perpajakan di Indonesia, akan tetapi di dibalik kelebihan tersebut tentu ada kekurangan nya. Salah satu kekurangan sistem pajak self-assessment adalah salah saji dan tidak ada transparansi. Selain itu minimnya pengetahuan tentang pajak menjadi pemicu kesalahan penginputan nilai pendapatan dan perolehan asset pada SPT. Wajib pajak pada mitra kerja PT ABC sering memberikan informasi yang tidak lengkap dengan beraneka ragam alasan sehingga transaksi pembelian asset tidak sebanding dengan nilai pendapatan, oleh karena itu banyak dari wajib pajak yang mengalami kebingungan dan tidak mampu memberikan keterangan secara detail saat menerima surat dari kantor pajak yang berisi permintaan dan penjelasan atas data dan keterangan atau sering disebut SP2DK.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis efektivitas penggunaan skema sistem komparasi yang diterapkan oleh PT ABC untuk mengukur nilai pendapatan dan pembelian asset yang lebih akurat dengan tingkat perbandingan yang relevan, sehingga hal ini dapat meminimalisir kesalahan dalam pengisian SPT pada wajib pajak orang

pribadi dan mitra kerja terhindar dari permintaan klarifikasi data dari Kantor Pajak. Sistem komparasi yang diterapkan pada mitra kerja PT ABC sejauh ini bernilai sangat positif dan penulis juga mengharapkan hal ini dapat dirasakan juga oleh masarakat luas sehingga wajib pajak tidak perlu merasa cemas dan ragu untuk menyajikan data pelaporan pajak yang sesuai.

LANDASAN TEORI

Pendapatan

Penerimaan baik berbentuk uang maupun keuntungan lainnya yang memiliki nilai dan berlaku saat biasa disebut sebagai pendapatan. Menurut Asraf, et al., (2019), “Pendapatan adalah sumber penghasilan seseorang yang sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”. Pendapatan merupakan jumlah uang yang diperoleh baik individu, perusahaan, atau entitas lainnya dari aktivitas mereka, seperti pekerjaan, bisnis, investasi, atau sumber lain. Menurut Saksana & Nurhadi (2020), “Pendapatan bisa diklasifikasikan dalam beberapa kategori yaitu pendapatan aktif, pendapatan Investasi dan pendapatan pasif”. Masing -masing pendapatan memiliki pengertian yang berbeda menurut cara memperolehnya misalnya Pendapatan Aktif diperoleh dari bekerja dan bentuk imbalan nya berupa gaji atau upah, sementara pendapatan investasi merupakan keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi seperti deviden, bunga atau capital gain. Pendapatan pasif berbeda dari pendapatan lainnya karena pendapatan ini tidak melibatkan aktivitas secara langsung namun pendapatan ini diperoleh dari asset yang menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan misalnya pendapatan sewa gedung, sewa kendaraan atau bisnis otomatis. Klasifikasi pendapatan ini membantu dalam menganalisis sumber-sumber pendapatan dan memahami bagaimana pendapatan tersebut dapat digunakan dan dioptimalkan

Asset

Asset adalah kekayaan yang memberikan manfaat dimasa yang akan datang, setidaknya ada tiga karakteristik yang harus dimiliki oleh asset yaitu mempunyai manfaat ekonomi dimasa yang akan datang, dikendalikan dan dikuasai oleh entitas, terjadi akibat transaksi dari masa lalu (Swandayani & Kusumaningtias, 2012). Terdapat beberapa jenis asset jika dilihat dari berbagai sudut pandang seperti jenis, wujud, jangka

waktu dan fungsinya. Menurut PSAK No.16 aset adalah sesuatu kekayaan yang berharga atau bernilai bagi seseorang atau Perusahaan yang akan mendatangkan manfaat baik kekayaan tersebut berwujud maupun tidak berwujud. Berdasarkan karakteristik dan penggunaannya, aset dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis utama (Kurniasari & Kurnia, 2021):

1. **Asset Lancar.** Asset yang dapat diubah menjadi kas dan dapat digunakan dalam jangka pendek. Contoh: Piutang usaha, saldo bank, uang tunai, persediaan, Surat berharga, dan beban dibayar di muka.
2. **Asset Tetap.** Asset tetap memiliki fisik yang secara nyata dapat terlihat secara langsung dan biasanya nilai manfaatnya berguna untuk jangka waktu yang lebih panjang Contoh: Tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, dan mesin.
3. **Asset Tidak Berwujud.** Aset yang tidak terlihat namun memiliki nilai ekonomis. Contoh: Hak cipta, lisensi, merk dan lain sebagainya.
4. **Asset Investasi.** Asset yang dimiliki untuk tujuan investasi dan menghasilkan pendapatan di masa depan, biasanya dalam bentuk saham, obligasi, atau properti investasi. Contoh: Saham perusahaan lain, properti investasi, dan surat berharga lainnya.
5. **Asset Biologis.** Asset yang berasal dari aktivitas pertanian dan memiliki kehidupan biologis. Contoh Tanaman, hewan ternak, dan hutan yang dikelola.
6. **Asset Keuangan.** Asset yang terdiri dari kas, modal perusahaan lain, atau hak kontraktual keuangan lainnya. Contoh: Piutang, investasi dalam ekuitas atau obligasi, dan derivatif keuangan.
7. **Asset Tidak Lancar Lainnya.** Asset yang tidak masuk dalam kategori aset lancar atau aset tetap, tetapi tetap memiliki masa manfaat yang lebih panjang. Contoh: Uang muka jangka panjang, properti yang disewakan, dan aset tetap tidak digunakan.

Self-Assessment Pajak

Self-assessment pajak adalah sistem yang mewajibkan individu maupun badan untuk bertanggung jawab dan menghitung sendiri nilai pajaknya tanpa harus menunggu perhitungan dari otoritas pajak (Puspita, 2019). Menurut Batubara, et al., (2024), “self-assessment adalah suatu sistem di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak wajib pajak serta mengurangi beban administrasi otoritas pajak”. Sistem ini mendorong kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Berikut Keuntungan Sistem Self-Assessment:

1. Meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan karena mengurangi beban pemeriksaan rutin oleh otoritas pajak.
2. Mendorong wajib pajak untuk lebih memahami kewajiban perpajakan mereka dan berperan aktif dalam memenuhi kewajiban tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan berbagai teknik pengumpulan data yaitu observasi, studi kasus atas dokumen pajak orang pribadi dan wawancara. Teknik wawancara dan observasi dilakukan pada mitra kerja PT ABC secara mendalam guna memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan serta mengamati hal hal apa saja yang menjadi penyebab terjadi nya kesalahan pengisian SPT, selain itu studi kasus juga sangat diperlukan guna mengetahui perbandingan data sebelum menggunakan sistem komparasi dan sesudah menggunakan nya.

Setelah dilakukan observasi terhadap data wajib pajak terdapat 97 responden yang memenuhi kriteria Sampling. Sampling yang digunakan tentu harus memenuhi tujuan penelitian yang tentunya berkaitan erat dengn pelaporan wajib pajak orang pribadi. Menurut (Oktavia & Sunrowiyati, 2019), “Purposive sampling digunakan karena adanya pertimbangan tertentu”. Berikut tabel kriteria Responden yang memenuhi objek penelitian:

Tabel 1. Kriteria Responden		
No	Kriteria responden	Jumlah Responden
1	Responden memiliki pendapatan aktif dan non aktif tahun 2018 - 2022	221
2	Responden melakukan pelaporan pajak mandiri pada tahun 2018 - 2019	117
3	Responden menggunakan jasa PT Xxx dalam pelaporan pajak tahun 2020 – 2022	115
4	mendapat surat himbaun atau surat permohonan penjelasan atas data dan keterangan (SP2DK) dari kantor pajak terkait kepemilikan asset tahun 2018 – 2022	50
5	Memilki riwayat transaksi pembelian asset pada tahun 2018 – 2022	97
	Jumlah sampel yang memenuhi kriteria	97

Sumber: Data penelitian, 2024

Sesuai observasi data responden jenis pendapatan berdasarkan sumber yang diperoleh dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu pendapatan aktif dan pasif, hasil perolehan atas pendapatan yang diterima secara rutin tiap bulan disebut pendapatan aktif, sementara pendapatan yang hanya diterima sewaktu waktu dan tidak bersifat continue disebut pendapatan pasif. Selain itu terdapat pendapatan yang cara memperoleh nya tidak memerlukan pengorbanan karena bisa diperoleh secara cuma-cuma seperti pendapatan atas hadiah dan juga warisan. Perlu ditekankan bahwa pendapatan yang dimaksud pada kriteria ini merupakan pendapatan netto yang artinya pendapatan tersebut sudah termasuk potongan pajak dan juga biaya-biaya atas harga pokok penjualan. Berikut rincian tabel kriteria pendapatan:

Tabel 2. Kriteria Pendapatan

No	Pendapatan	Kriteria
1	Kegiatan usaha	Pendapatan Aktif
2	Bekerja	Pendapatan Aktif
3	Sewa Bangunan	Pendapatan Aktif
4	Sewa Kendaraan	Pendapatan Pasif
5	Hadiah	Pendapatan Pasif
6	Warisan	Pendapatan Pasif

Sumber: Data penelitian, 2024

Pada umumnya pendapatan yang memiliki nilai lebih besar dibandingkan kebutuhan biaya hidup tentunya akan dimanfaatkan untuk melakukan pembelian asset sehingga seseorang tetap dapat menikmati hasil dari pendapatan tersebut dengan kurun waktu yang lebih panjang dan dapat dimanfaatkan kembali jika sewaktu-waktu dalam kondisi yang tidak stabil atau kehilangan pekerjaan, berikut jenis kepemilikan asset yang diklasifikasikan sesuai kebutuhan penelitian :

Tabel 3. Kriteria Asset

No	Pendapatan	kriteria
1	Kas	Bank & Kas
2	Bank	Bank & Kas
3	Tabungan	Bank & Kas
4	Giro	Bank & Kas
5	Investasi	Asset lancar
6	Saham	Asset lancar
7	Kendaraan	Asset Tetap
8	Tanah dan bangunan	Asset Tetap
9	Emas	Asset Tetap
10	Paralatan dan furniture	Asset Tetap

Sumber: Data penelitian, 2024

Berdasarkan klasifikasi pendapatan dan asset tersebut, Langkah yang diambil untuk menekan permasalahan yang timbul akibat nilai yang dilaporkan pada SPT tidak mewakili nilai pendapatan dan kepemilikan asset yang sebenarnya maka melalui perhitungan sistem komparasi yang diterapkan PT ABC cukup memberikan dampak positif bagi mitra kerja serta memperkecil adanya surat permintaan penjelasan data oleh Kantor pajak. Sistem komparasi tersebut dapat digambarkan dengan system perbandingan sebagai berikut: $B + I + L \geq C + A + R$

Keterangan

B = Bank dan kas

I = Income/ Pendapatan aktif dan non aktif

L = Liability / Hutang

C = Cost / Biaya hidup

A = Asset/ Asset lancar dan asset tetap

R = Receivables / Piutang

Dalam sistem komparasi yang dinyatakan dalam rumus tersebut, apabila biaya hidup, pembelian asset dan pemberian pinjaman memiliki nilai yang lebih besar dari pada pendapatan ditambah kas dan bank maka perlu di cek Kembali apakah perolehan atas asset tersebut menimbulkan hutang atau tidak (Sufyati, et al., 2021). Hal yang paling sering terjadi saat pelaporan pajak adalah posisi hutang maupun piutang yang sering diabaikan, padahal dua komponen ini merupakan hal penting untuk mengcover kekurangan pencatatan antara total pendapatan dan total pengeluaran yang tidak seimbang.

HASIL PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diantaranya responden banyak mengalami kendala saat pengisian SPT dikarenakan minim nya pelatihan dan informasi yang diperoleh sehingga pengisian SPT tidak mempertimbangkan angka yang logis. Berikut ini beberapa kendala umum yang dihadapi oleh wajib pajak dalam proses pengisian SPT:

1. Tidak memahami peraturan pajak.

Tidak semua wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang penghasilan yang harus dilaporkan, biaya yang dapat dikurangkan, dan tarif pajak.

2. Dokumen Pendukung yang tidak lengkap.

Beberapa Dokumen yang diperlukan untuk mengisi kelengkapan SPT diantara adalah seperti bukti potong pajak penghasilan, bukti potong pembelian, faktur pembelian, faktur penjualan maupun dokumen pengeluaran biaya lainnya.

3. Tidak memahami berbagai jenis penghasilan

Dilihat dari keterkaitan dengan unsur pajak, penghasilan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Penghasilan dengan unsur pajak

Berikut beberapa penghasilan yang mengandung unsur pajak

1) Penghasilan dari pekerjaan

Penghasilan ini diperoleh sebagai akibat dari imbalan atas jasa dan pekerjaan yang telah diberikan. Imbalan atas jasa dan pekerjaan ini dapat berupa gaji, upah, honorarium, bonus, gratifikasi tunjangan hari raya

2) Penghasilan dari usaha

Keuntungan dari menjalankan usaha yang berupa laba usaha merupakan penghasilan yang mengandung unsur pajak

3) Penghasilan dari pekerjaan bebas

Penghasilan ini diperoleh dari pekerjaan profesi seperti dokter, akuntan, pengacara, konsultan dan lain sebagainya

4) Penghasilan dari Modal

Keuntungan dari penanaman modal ini dapat berupa bunga, deviden tanpa diinvestasikan di Indonesia, royalty dan lainnya

5) Penghasilan dari hadiah

6) Penghasilan dari sewa

b. Penghasilan Tanpa unsur pajak

1) Warisan

Warisan yang diperoleh dari garis keturunan satu generasi terhindar dari pajak misalnya warisan dari ayah/ibu ke anak

2) Deviden yang diinvestasikan di Indonesia

Deviden yang diinvestasikan di Indonesia dapat terbebas dari pajak jika memenuhi syarat yang telah ditetapkan pada undang-undang harmoni perpajakan th 2021

3) Penghasilan dari Lembaga Pendidikan dan Kesehatan Non-Komersial.

Penghasilan yang diterima oleh lembaga pendidikan atau kesehatan yang diberikan oleh pemerintah atau pihak lain untuk kegiatan non-komersial. Penghasilan ini biasanya tidak dikenakan PPh.

4) Penghasilan final

Penghasilan yang telah dipotong pph final misalnya penghasilan atas penyewaan tanah dan bangunan maka dari penghasilan itu tidak diperhitungkan lagi penghasilan kena pajak pada pasal 17.

4. Kendala Akses

Tidak semua responden memiliki akses yang baik, apalagi jika responden sedang melakukan perjalanan dinas di daerah terpencil, Sementara saat ini pelaporan pajak dilakukan secara online yang tentu saja memerlukan akses internet yang stabil.

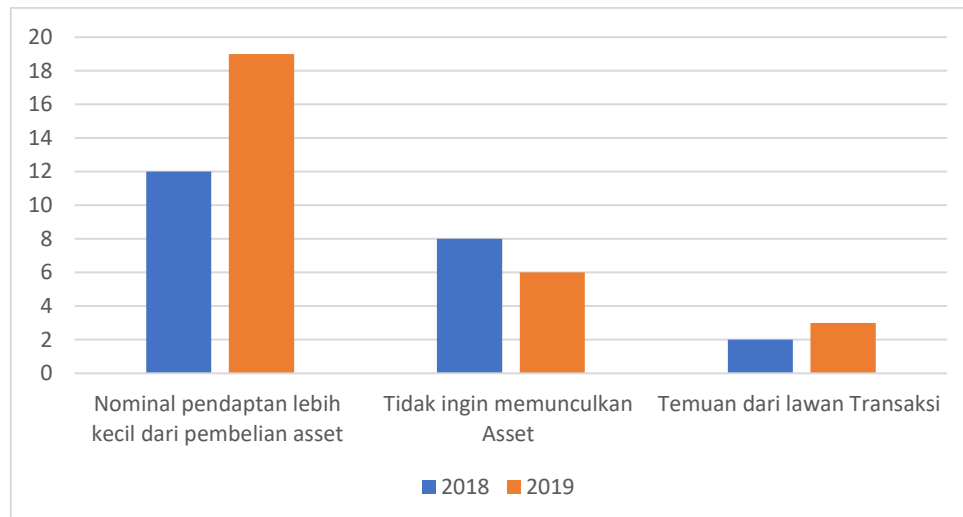
5. Kendala informasi

Kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai prosedur pengisian SPT dari kantor pajak serta peran dari wajib pajak yang kurang aktif untuk menggali informasi mengakibatkan pengisian SPT menjadi hal yang sulit dilakukan.

Responden yang tidak memahami peraturan pajak cenderung menyajikan laporan yang tidak mewakili nilai dan keadaan yang sebenarnya, salah satunya adalah pembelian asset. Berdasarkan hasil penelitian berikut beberapa alasan responden tidak mengungkapkan nilai pembelian asset yang sebenarnya:

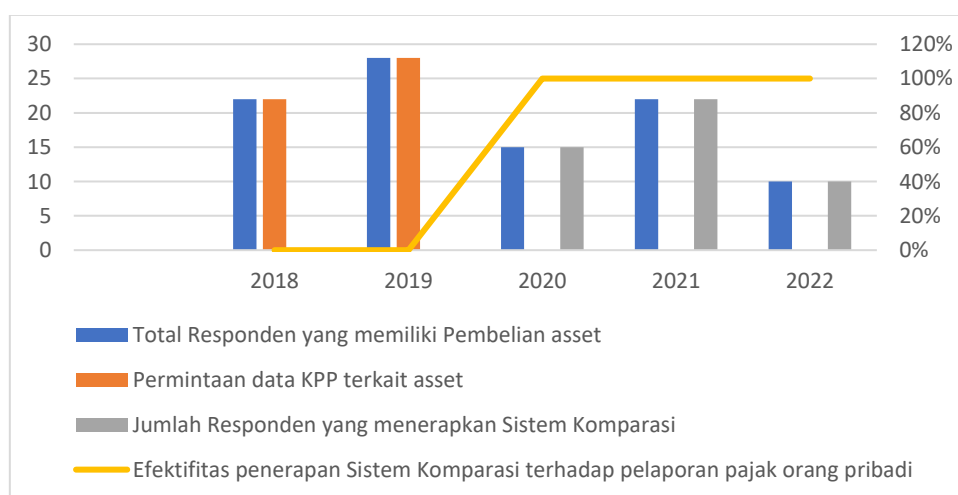
1. Takut dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi.
2. Tidak dapat membedakan transaksi yang termasuk asset atau biaya konsumsi.
3. Dengan sengaja tidak ingin mencantumkan tambahan asset.

Kurangnya informasi inilah yang memicu pertanyaan dari kantor pajak terlebih informasi dari lawan transaksi dapat dengan mudah diakses. Penerbitan faktur pajak keluaran, bukti potong pajak penghasilan maupun transaksi bank yang cukup nominatif dapat mempermudah pihak kantor pajak untuk mendeteksi kesesuaian pencantuman nominal pendapatan terhadap data pembelian asset. Sesuai data yang dimiliki PT ABC terhadap data klien yang memiliki permasalahan pencatatan asset terhadap pelaporan pajak dapat digambarkan sesuai grafik berikut ini.



Grafik 1. Permasalahan Pencatatan Asset

Sistem komparasi dengan formula $B + I + L \geq C + A + R$ pada 50 responden di tahun 2018 dan 2019 terbukti sangat efektif, hal ini dikarenakan setelah dilakukan pembetulan SPT dengan menerapkan sistem komparasi tidak ada sanggahan ataupun pertanyaan ulang dari Kantor pajak. Hal ini cukup menggambarkan bahwa sistem komparasi dapat menjadi solusi yang perlu diterapkan saat pelaporan pajak karena mampu menekan permasalahan yang sering muncul (Hati, et al., 2022). Pada tahun 2020 - 2022 PT ABC menerima mitra Kerja baru sebanyak 47 orang yang memiliki transaksi pembelian asset dan tentu saja sistem komparasi ini diterapkan untuk pelaporan pajak tersebut. Berikut kami tampilkan data SPT pajak orang pribadi yang memiliki data pembelian asset yang sudah terlapor.



Grafik 2. Efektifitas Penerapan sistem Komparasi

Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem komparasi mampu menekan permasalahan terkait pencatatan asset dengan sangat efektif, hal ini terbukti dari hasil persentase penelitian yang tersaji, selain sistem komparasi yang diterapkan Tingkat kesadaran diri seseorang dalam mengungkapkan kepemilikan asset juga sangat berpengaruh, pada umumnya orang akan takut mengungkapkan kepemilikan asset dikarenakan ada kekhawatiran akan ditagihkan nilai pajak dengan nominal yang besar dari pada yang seharusnya. Padahal pembelian asset sendiri sudah termasuk pembayaran pajak karena saat transaksi pembayaran dilakukan seorang pembeli tanpa disadari telah melakukan PPN (Suharyono, 2021).

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sebagian besar responden tidak memahami bagaimana penghasilan dan pembelian aset mempengaruhi pelaporan pajak orang pribadi. Hal ini terlihat dari ketidakmampuan mereka dalam menjelaskan perbedaan antara penghasilan yang dilaporkan dan pembelian aset yang dilakukan kepada kantor pajak. Kurangnya pengetahuan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk peningkatan edukasi pajak di kalangan masyarakat untuk mengurangi kesalahan pelaporan dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem komparatif yang diterapkan oleh PT ABC dalam penanganan pelaporan pajak pribadi terbukti efektif. Sistem ini berhasil meminimalisir masalah yang timbul dari ketidaktahuan responden mengenai keterkaitan antara penghasilan dan pembelian aset. Oleh karena itu, pengadopsian sistem serupa dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pelaporan pajak pribadi, serta mengurangi potensi konflik atau ketidakpastian antara wajib pajak dan otoritas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asraf, A., Yurasti, Y., & Suwarni, S. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Dengan Bank Mandiri Konvensional. *MBIA*, 18(3), 121-136.
- Batubara, D. P., Purba, N. N., Tampubolon, S. F., Harahap, P. P., Barus, N. S. P., & Batu, D. P. L. (2024). ANALISIS PENINGKATAN TAX RATIO MELALUI PEMENGUTAN PAJAK PADA EMARKET MEDIA SOSIAL. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9(5).

- Hati, R. P., Merisca, A., & Santoso, C. B. (2022). Evaluasi Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Berbasis Sak Emkm Studi Kasus Pada Balabo Scrap. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 16(2), 230-237.
- Irfani, A. S. (2020). *Manajemen Keuangan dan Bisnis; Teori dan Aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniasari, R., & Kurnia, K. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(3).
- Oktavia, P. D., & Sunrowiyati, S. (2019). Penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada laporan keuangan UD. Karya Tunggal. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 4(1), 16-32.
- Puspita, M. E. (2019). Studi Komparasi Pengukuran Efisiensi pada Dual Banking Systems di Indonesia Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis. *JURNAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK)*, 3(1), 172-181.
- Saksana, J. C., & Nurhadi, N. (2020). Perbandingan Antara Metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto Dengan Metode Pembukuan Terhadap Besarnya Pajak Terhutang Pada Kantor Notaris "S". *Aliansi: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 15(2), 35-48.
- Siahaan, S. D. N., Putriku, A. E., & Saragih, L. S. (2022). *Pengenalan Bisnis Teori dan Praktik*. Merdeka Kreasi Group.
- Sjahputra, A., & Hunein, H. (2024). Pengaruh Penjualan Bersih Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(1), 69-79.
- Sufyati, H. S., Firmansyah, H., Nugraha, D. B., Ernawati, T., Indarto, S. L., Fitriana, A. I., ... & Martaseli, E. (2021). *Analisis laporan keuangan*. Penerbit Insania.
- Suharyono, S. (2021). Penerapan Software Akuntansi Pada Umkm Ferolas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 1-6.
- Sumahardanti, N. N. D., & Fatimah, S. (2023). Perbandingan Penggunaan Metode Gross Dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Dampaknya Terhadap Beban Dan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Muda Jaya Bersama Melalui Ibs Consulting. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 4(1), 51-82.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Sinar Grafika.
- Swandayani, D. M., & Kusumaningtias, R. (2012). Pengaruh inflasi, suku bunga, nilai tukar valas dan jumlah uang beredar terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia periode 2005-2009. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 147-166.